

Dampak Globalisasi Pada Politik, Ekonomi, Cara Berfikir Dan Ideologi Serta Tantangan Dakwahnya

Retna Dwi Estuningtyas
Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Jakarta

rerefnadwie@gmail.com

Abstract

Globalization as a controversial issue has created a large gap in the political life of the country, destroys local culture, and rips out boundaries between countries. Threats to human life due to globalization are also increasingly diverse, not only from major or nuclear war, but also from radical forces that develop in society and give birth to terrorism. While the impact of globalization on the world economy is: global poverty and inequality, the world food crisis, money laundering. The impact of globalization on people's thinking is: the existence of virtual solidarity, the emergence of the transnational women's movement. Globalization also affects ideology and da'wah. The impact on the world of da'wah is: changing the paradigm of da'wah and preparing preachers in preaching in an era that is already very advanced, the preacher must utilize information technology in carrying out da'wah activities. The era of globalization has brought together social, economic, political, security, cultural and environmental dimensions through a process of integration, interconnection and dependence. Therefore, problems that arise are not only more complex but cross national (transnational) boundaries and consequently affect and cause unavoidable impacts for all citizens of the world.

Keywords: Globalization, State, Relationships, Da'wah

Abstrak

Globalisasi sebagai isu kontroversial telah menciptakan celah besar dalam kehidupan politik negara, menghancurkan budaya lokal, serta merobek sekat antar negara. Ancaman terhadap kehidupan manusia akibat globalisasi juga semakin beragam, tidak hanya datang dari perang besar atau nuklir, tetapi juga dari kekuatan radikal yang berkembang di masyarakat dan melahirkan terorisme. Sementara dampak globalisasi terhadap ekonomi dunia adalah: kemiskinan dan kesenjangan global, krisis pangan dunia, pencucian uang. Dampak globalisasi terhadap cara berpikir orang adalah: adanya solidaritas virtual, munculnya gerakan perempuan transnasional. Globalisasi juga mempengaruhi ideologi dan dakwah. Dampak terhadap dunia dakwah adalah: mengubah paradigma dakwah dan mempersiapkan da'i dalam berkhotbah di era yang sudah sangat maju, maka da'i harus memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan kegiatan dakwah. Era globalisasi telah menyatukan dimensi sosial, ekonomi, politik, keamanan, budaya dan lingkungan melalui proses integrasi, interkoneksi dan ketergantungan. Oleh karena itu, masalah yang muncul tidak hanya semakin kompleks tetapi melintasi batas-batas nasional (transnasional) dan akibatnya mempengaruhi dan menyebabkan dampak yang tidak dapat dihindari bagi semua warga dunia.

Kata kunci: Globalisasi, Negara, Hubungan, Da'wah.

A. Pendahuluan

Globalisasi secara sederhana dapat dikatakan sebagai penyempitan dan percepatan keterkaitan seluruh dunia, batas-batas teritorial maupun budaya antar bangsa menjadi seolah hilang. Proses ini menjadi sebuah isu kontroversial dalam studi ilmu politik. Sebagian berpendapat bahwa globalisasi mendatangkan kematian negara-bangsa berdaulat, sebagai kekuatan global yang melemahkan kemampuan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian mereka dan masyarakatnya sendiri. Ohmae menuliskan, “globalisasi telah menghancurkan budaya-budaya lokal, merobek pasar-pasar di belahan dunia manapun dan merobohkan dinding pembatas antar negara.” Sebagian lain yang mendukung ide globalisasi berpendapat bahwa negara-negara tetap merupakan unsur utama pembentuk tatanan dunia, “bagi mereka globalisasi merupakan kemajuan, Negara-negara harus menerimanya jika mereka ingin berkembang dan memerangi kemiskinan secara efektif.” (Stiglitz, 2012: 6)

Membidik arah globalisasi memang sulit, perubahan cepat sedang berproses. Dunia seakan berlari tanpa keseimbangan, sulit terlihat jangkauan arahnya apalagi menentukan dengan pasti sifat-sifat tatanan dunia yang menjadi muara. Fukuyama menekankan dalam menghadapi era globalisasi setiap Negara harus mengarahkan kekuatan Negara kearah tujuan-tujuan yang dianggap sah oleh rakyat yang dilayaninya, serta menjalankan kekuasaan dibawah aturan hukum yang disepakati bersama. Aksi-aksi terorisme, penyebaran penyakit, bertahannya tingkat kemiskinan, serta merebaknya perang sipil, jelas merupakan sebuah gejala politik tentang kegagalan negara menjalankan perannya dalam menghadapi tantangan global. Sudah saatnya negara memperkuat perannya.(Fukuyama, 2005: xi). Globalisasi saat ini memang tidak berpihak kepada kaum miskin dunia, meski demikian pilihan untuk meninggalkan globalisasi juga tidak mungkin dilakukan sehingga permasalahan mendasarnya adalah bukan pada globalisasi itu sendiri melainkan bagaimana globalisasi itu dikelola.

Tulisan ini dimulai dengan mengemukakan konsep globalisasi sebelum menjelajahi implikasinya bagi peta politik dunia. Pembahasan ini disusun menjadi tiga bagian utama; Bagian pertama akan mendefinisikan globalisasi, Bagian kedua akan membahas dampak globalisasi terhadap politik global dan bagian ketiga akan merefleksikan tantangan etika yang ditimbulkan oleh realitas politik global, mengkaji pemikiran terkini tentang kondisi, dan prospek politik global yang lebih manusiawi.

B. Pembahasan

Sebelum membahas lebih jauh, penulis terlebih dahulu akan memaparkan tentang pengertian globalisasi. Dalam bahasa Inggris globalisasi berasal dari kata global, “world-wide; embracing the whole of group of items” (Hornby, 1974:366), yang berarti mendunia; melingkupi seluruh kelompok materi. Secara istilah globalisasi memiliki beberapa pendekatan pengertian, yaitu; Pertama, globalisasi sebagai internasionalisasi. Di sini, globalisasi dipandang hanya untuk menggambarkan hubungan lintas - perbatasan antara negara-negara.

“Globalization describes the growth in international exchange and interdependence. With growing flows of trade and capital investment there is the possibility of moving beyond an international economy (where 'the principle entities are national economies') to a 'stronger' version - the globalized economy in which, 'distinct national economies are subsumed and rearticulated into the system by international processes and transactions” (Hirst & Thompson, 2000:3).

Dalam pengertian lain Globalisasi menggambarkan pertumbuhan dalam pertukaran internasional dan saling ketergantungan. Dengan arus pertumbuhan perdagangan dan investasi modal memungkinkan ekonomi nasional bergerak melampaui ekonomi internasional (dengan entitas prinsip adalah ekonomi nasional) untuk menjadi lebih kuat - ekonomi global adalah sebuah proses di mana ekonomi nasional yang berbeda-beda diintegrasikan ke dalam sistem oleh proses dan transaksi internasional.

Kedua, globalisasi sebagai liberalisasi. Dari berbagai definisi menunjukkan bahwa globalisasi menciptakan kebebasan pasar. *“globalization' refers to 'a process of removing government-imposed restrictions on movements between countries in order to create an open, borderless world economy.” (Jaen Art Scholte, Globalization, 2000:16).* Dengan kata lain globalisasi merujuk pada proses menghilangkan pembatasan yang dikenakan pemerintah terhadap pergerakan antar negara dalam rangka menciptakan sebuah ruang terbuka, menghilangkan batas ekonomi dunia.

Ketiga, globalisasi sebagai universalisasi. Dalam hal ini, kata global digunakan untuk menunjukkan arti menjadi seluruh dunia. *“globalization is the process of spreading various objects and experiences to people at all corners of the earth.” (Ghasemi, 2012: 3).* Dengan demikian globalisasi adalah proses penyebaran berbagai objek dan pengalaman kepada orang-orang di seluruh penjuru bumi. Sebagai contoh dari pengertian ini adalah penyebaran komputasi, televisi, dan lain-lain.

Keempat, globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi. Globalisasi dipahami oleh sebagian ahli sebagai dinamisasi cara berfikir dan gaya hidup. Sebagai contoh dalam hal ini adalah struktur sosial modernitas seperti kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme tersebar di seluruh dunia. Biasanya menghancurkan budaya lokal dan prosesnya menjadi penentuan atas nasib masing-masing peradaban lokal. Seorang pemikir Muslim berpendapat (Jabiry, 2001:137).

أن الدعوة إلى العولمة إذا صدرت من بلد أو جماعة فإنها تعني تعميم نمط من الأنماط التي تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة وجعله يشمل الجميع، العالم كله.

Hal ini berarti Propaganda globalisasi jika digaungkan oleh suatu negara atau kelompok, ia berarti generalisasi pola hidup yang menjadi karakter khas mereka menjadikannya menembus seluruh batas dunia.

Kelima, globalisasi sebagai *deterritorialization* atau sebagai penyebaran *supraterritoriality*. *Globalization' entails a 'reconfiguration of geography, so that social space is no longer wholly mapped in terms of territorial places, territorial distances and territorial borders.” (Giddens, 1990: 64).* Globalisasi diartikan sebagai rekonfigurasi

geografis, sehingga ruang sosial tidak lagi sepenuhnya dipetakan berdasarkan tempat teritorial, jarak teritorial dan batas wilayah.

Pengertian semacam ini juga dikemukakan oleh Yusuf al Qaradhawi (1421:229) berpendapat:

العولمة تعني إزالة الحواجز والمسافات بين الشعوب بعضها و بعض، و بين الأوطان بعضها و بعض، و بين الثقافات بعضها و بعض. و بذلك يقترب الجميع من ثقافة كونية و سوق كونية و أسرة كونية، و تحويل العالم إلى قرية كونية

Dari beberapa terminologi tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa globalisasi adalah sebuah proses memiliki beberapa karakteristik yaitu, Pertama, terjadinya pencairan kegiatan sosial, budaya, politik dan ekonomi lintas batas negara. Kedua, terjadinya intensifikasi dari dan antar setiap bidang kehidupan sosial. Ketiga, terjadinya percepatan interaksi dan proses global. Keempat, terjadinya keterperangkapan konsekuensi lokal ke global dan sebaliknya.

B.1 Dampak Globalisasi dalam Peta Politik Dunia

Globalisasi telah menimbulkan sebuah kesenjangan besar dalam kehidupan politik negara. Kehidupan politik negara terpecah menjadi dua bagian yang terpisah antara tindakan domestik atau internasional, yang keduanya beroperasi sesuai dengan logika, aturan, aktor maupun agenda yang berbeda.

Dalam tataran konsep, politik global seharusnya merumuskan ketertiban dunia, memfokuskan perhatian pada struktur global dan proses pembuatan undang-undang, pemecahan masalah, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam sistem dunia. Hal ini membutuhkan kesefahaman bersama tentang pentingnya negara dan geopolitik. Namun demikian dalam realitasnya, politik itu sendiri telah mengglobal dan terlihat wujudnya secara sederhana berupa konflik antar negara. Dengan kata lain, globalisasi saat ini melahirkan perebutan pengaruh antara negara-negara. Demikian yang disinyalir oleh Ougard (2004:5) *Global politics directs our attention to the emergence of a fragile global polity within which 'interests are articulated and aggregated, decisions are made, values allocated and policies conducted through international or transnational political processes.* Politik global mengarahkan perhatian kita pada munculnya pemerintahan global yang rapuh di mana kepentingan dibicarakan dan dikumpulkan, keputusan dibuat, nilai-nilai dialokasikan dan kebijakan dilakukan melalui proses politik internasional atau transnasional.

Dalam sistem politik global, masing-masing pelaku seperti Negara, maupun aktor transnasional lainnya berperilaku dalam berbagai cara yang fundamental tidak hanya terkait dengan struktur dan proses internal dalam dimensi politik, ekonomi, sosial maupun budaya, melainkan lebih dari itu terkait dengan persepsi mereka tentang kedudukan dan peran mereka dalam sistem global. Kedudukan para pelaku dalam sistem politik global diukur dari dimensi power yang meliputi, *the capability of persuading, leading, influencing, promising, attracting, rewarding, inspiring maupun coercing.* (Dougherty, Dalam Winarno, 2014, hlm xviii).

Globalisasi juga telah memunculkan suatu pola hubungan baru dimana entitas negara tidak lagi menjadi otonom dan berkuasa penuh atas wilayah teritorialnya atau dapat dikatakan negara tidak lagi menjadi satu-satunya entitas politik pemegang kedaulatan, melainkan telah terbentuk hubungan yang saling bergantung dan kesalinghubungan antara negara-bangsa dan para pelaku transnasional yang terintegrasi secara global. Keadaan ini melahirkan sebuah fenomena baru, yaitu ; menguatnya aktor-aktor non-state sebagai pusat kekuasaan baru dalam interaksinya dalam hubungan internasional. Fenomena berikutnya adalah permasalahan-permasalahan baru yang muncul tidak mungkin diselesaikan oleh masing-masing negara nasional sendirian, melainkan diselesaikan bersama-sama sebagai komunitas warga dunia. Keadaan semacam inilah yang kemudian memunculkan gagasan *global governance*.

Sebagian pemikir percaya bahwa gagasan ini merupakan upaya untuk menjawab tantangan yang muncul dari globalisasi, yang berupa pusat-pusat kekuasaan, otoritas serta kompetensi yang baru di luar kerangka negara-bangsa. Menurut Rosenau *global governance* adalah, “*an order that lacks a centralized authority with the capacity to enforce decision on a global scale*”(Rosenau, 1992:7). Dalam pengertian lain *global governance* adalah sebuah gerakan yang berupaya mengintegrasikan para aktor transnasional dengan tujuan menyelesaikan permasalahan bersama dan mengambil sebuah keputusan.

Global governance bisa berbentuk formal yang memiliki perangkat hukum serta institusi untuk mengatur beragam aktor internasional seperti IMF dan Bank Dunia, maupun berbentuk informal dalam bentuk yang temporal, seperti institusi yang membahas isu lingkungan, AIDS, dan lain-lain.

Meski ditujukan sebagai upaya penyelesaian masalah, *global governance* semacam IMF dan Bank Dunia masih menyisakan kontroversial terkait peran mereka dalam pembangunan di negar-negara dunia ketiga (Winarno, 2014:204) Dalam konteks *global governance*, IMF dan Bank Dunia belum mampu menciptakan kesetaraan terutama membantu negara-negara yang terkait krisis, dengan mengambil alih komando manajemen perekonomian negara penerima bantuan. “Setelah krisis Asia pada tahun 1997, kebijakan-kebijakan IMF malah memperburuk krisis di Indonesia dan Thailand.” (Stiglitz, 2012:24)

B.1.1 Kerjasama Kawasan

Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua muncul fenomena politik baru dalam politik global yaitu, kerjasama dan integrasi negara dalam suatu kawasan dalam skala benua. “Meski bukan satu-satunya alasan, globalisasi adalah penyebab munculnya kerjasama kawasan.” (Budi Winarno, 2014:93). Kerjasama kawasan bisa ditemukan dalam hampir semua kawasan di dunia. Di Eropa terbentuk Uni Eropa, Di Amerika Utara ada kerjasama tiga Negara yaitu Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko dalam organisasi NAFTA (North America Free Trade Agreement). AS juga bergabung dengan El Salvador, Nikaragua, Guatemala, Honduras dan Kosta Rika untuk membentuk CAFTA (Central America Free Trade Agreement). Kemudian di Amerika latin terbentuk CARICOM (Caribbean Community and Common Market), Di Afrika dan Timur Tengah dibentuk Liga Arab, di Africa terbentuk African Union. Di Asia

Pasific terbentuk Asian Pasific Economic Cooperation dan ASEAN yang melibatkan kerjasama ekonomi, sosial, budaya di kawasan Asia Tenggara.

Kerjasama kawasan memberikan batas-batas bagi negara bangsa untuk melakukan tindakan atas nama kedaulatan. Menghadapi dampak globalisasi negara-negara mencoba menganalisa dampak-dampak yang muncul dan meminimalisir perasaan terancam dengan melakukan kerjasama kawasan. Menurut Stubbs dan Underhill, ada tiga elemen penting penyebab terbentuk kerjasama kawasan. “Pertama, adanya pengalaman historis dan perasaan yang sama akan persoalan antar Negara dalam suatu batas geografis. Kedua, adanya interaksi yang lebih intensif diantara anggota dibanding dengan interaksinya dengan dunia luar. Ketiga, munculnya organisasi memberikan kawasan tersebut kerangka institusi dan hukum yang disepakati bersama.” (Winarno,2014:93).

Kerjasama kawasan dapat memberikan dampak positif bagi Negara-negara yang tergabung dalam hal mengintensifkan kerjasama dalam berbagai aspek. Dalam aspek ekonomi bisa memunculkan transaksi perdagangan antar Negara anggota. Dalam aspek politik, kerjasama kawasan bisa menjadi pendorong bagi perdamaian antar Negara baik dalam tataran kawasan maupun dalam tataran global. Sebagai contoh adalah ASEAN yang akan membentuk ASEAN Political and Security Community pada tahun 2015.

Uni Eropa mungkin saat ini menjadi kawasan dengan regionalisme yang paling sempurna diantara kawasan lainnya. Selain telah memiliki visi dan misi serta regulasi bersama, regionalism mereka menjadi semakin diikat dengan adanya penggunaan mata uang bersama yaitu, EURO. Para analis mengemukakan bahwa, “The EU political structures have policy competence, authority and authonomy from natonal political institutions, then an effective European state exists.” (Higgott, 1998: 62). Dengan kata lain Uni Eropa merupakan kawasan dengan regionalism yang baik karena struktur politik yang mereka bangun mempunyai kompetensi kebijakan, otoritas dan otonomi dari institusi politik nasional yang efektif diantara Negara-negara yang ada.

Berbagai keuntungan yang diperoleh dari terbentuknya kerjasama kawasan dalam berbagai segi mendorong berbagai kawasan meniru Uni Eropa. Wacana penggunaan mata uang bersama juga pernah diusung oleh ASEAN meski belum mewujudkan hasilnya. Namun demikian Sekalipun kerjasama kawasan memiliki banyak keuntungan namun tak terlepas dari “kelemahan dalam aspek kedaulatan politik negara-negara yang tergabung dalam kerjasama.” (Winarno, 2014:116). hal ini terjadi karena mau tidak mau Negara-negara anggota harus membagi kedaulatan mereka kepada institusi regionalismenya.

B.1.2 Nasionalisme dan Konflik Internal

Sebagai sebuah ideologi tentang kesadaran rakyat terhadap kehidupan berbangsa, harus diakui bahwa peran nasionalisme dengan Negara bangsa mengalami tantangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah nasionalisme masih relevan. Dalam bukunya, Yusuf al Qaradhawi (1421:239) menuliskan,

أصابت العولمة دولتنا القومية بالتدهور و الضعف عن طريق الإستعمار المباشر أولاً، ثم عن طريق مختلف وسائل فرض النفوذ و السيطرة الاقتصادية في مرحلة ما بعد الاستقلال السوري، ثم عن طريق ما فرضة و تحاول ترسيخة مؤسسات التمويل الدولة من سياسات

Dengan kata lain menurut al Qaradhawi globalisasi menyebabkan peran nasionalisme dalam negara semakin melemah, pertama melalui imperialisme secara langsung, melalui berbagai sarana yang dipaksakan untuk menguasai ekonomi pasca kemerdekaan negara dan juga melalui program yang dipaksakan melalui lembaga-lembaga moneter dunia.

Melemahnya nasionalisme Negara bangsa, terjadi karena sebagai sebuah institusi yang mendapatkan legitimasi, Negara harus mengakomodasi kepentingan warga negaranya. "Negara akan mengalami sebuah kontradiksi jika kepentingan transnasional berbenturan dengan kepentingan warga negaranya." (Husein, dalam Dault, 113).

Ancaman terhadap nasionalisme negara bangsa ini tidak cukup dari pelaku-pelaku politik transnasional saja, melainkan juga dari konflik internal yang disebabkan sentiman etnik maupun sentimen keagamaan, serta asas kebebasan individu yang ditawarkan globalisasi. Dan dalam kenyataannya, ditengah meleburnya masyarakat dunia dan jaringan global, konflik dan pergolakan semakin menguat. Konflik yang terjadi di banyak belahan dunia seringkali diawali dengan proses marginalisasi baik secara ekonomi ataupun politik terhadap sebuah etnik, seperti Konflik yang terjadi di Srilanka antara pemerintah dan gerilyawan Tamil Elam, atau konflik karena sentimen agama seperti terjadi di Ambon dan Poso.

Menurut Adhyaksa Dault, "rangkaiian krisis multi dimensi ini harus dijawab dengan melakukan refleksi kritis atas negara-bangsa tersebut." (Dault, 2003: 114) Lebih lanjut ia mengemukakan, sebagai contoh di Indonesia, pada tingkat ekonomi terjadi pembukaan pasar-pasar asing, para politisi lebih senang menjamu kapitalis mancanegara daripada konstituen dalam negerinya, perusakan lingkungan oleh perusahaan multinasional, dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat di jawab dengan membangkitkan kembali nasionalisme hingga harga diri dan kedaulatan Negara menjadi tegak.

Nasionalisme pada era globalisasi dapat dibangun dengan tujuan memasang barikade demi menahan serbuan kekuatan-kekuatan transnasional yang merusak. Menurut Budi Winarno, ada beberapa factor yang dapat menumbuhkan nasionalisme, yaitu pertama faktor internal berupa (a) munculnya rasa saling memiliki sebagai bagian dari suatu bangsa, (b) kebanggaan terhadap sejarah kejayaan masa lampau, (c) adanya keragaman yang memunculkan semangat membentuk identitas bersama. Faktor berikutnya adalah faktor eksternal yaitu (a) adanya imperialisme Negara maju atas Negara-negara dunia ketiga melalui liberalisasi dan privatisasi (b) Ancaman dari luar yang berupa masalah territorial, Pelecehan kedaulatan atau klaim atas kebudayaan dan (c) munculnya keinginan melindungi budaya lokal dari modernisasi (Winarno,2014: 247)

Di tengah himpitan arus globalisasi dan maraknya kebebasan individu serta konflik etnik, semangat nasionalisme hendaknya dihangatkan kembali guna mempertahankan kesatuan bangsa. konflik etnik dapat dihindari dengan menumbuhkan toleransi dan rasa bangga akan keanekaragaman budaya yang dimiliki.

B.1.3 Terorisme Global

Dalam era global ancaman terhadap kehidupan manusia semakin beragam. ancaman tersebut tidak hanya berasal dari perang-perang besar atau nuklir, melainkan juga dari kekuatan-kekuatan radikal yang berkembang dalam masyarakat dan melahirkan terorisme. Meluasnya aksi terorisme ke seluruh dunia dan menjadi fenomena global disebabkan setidaknya oleh tiga faktor, yaitu perkembangan jalur transportasi internasional, perkembangan teknologi komunikasi yang pada gilirannya menghimpun pihak-pihak dengan gagasan yang sama, serta penyebaran berita terorisme yang memberikan efek ketertarikan (Winarno,2014: 247).

Terorisme adalah sebuah tindak kejahatan yang tidak tunduk kepada aturan apapun, karena nilai kebenarannya terletak dalam dirinya sendiri. (Hendropriyono, 2009:435). terorisme merupakan fenomena yang kompleks namun memiliki ciri utama yaitu penggunaan tindakan pemaksaan. salah satu kerangka tentang klasifikasi dan analisa tentang tipologi terorisme adalah yang dikemukakan oleh Wilkinson, ia mengategorisasikan terorisme menjadi empat tipe yaitu: “(a) kriminal (b) psikis (c) perang dan (d) politik.” (Wilkinson, dalam Budi Winarno, 2014: 175). terorisme kriminal merupakan tindakan terror dengan tujuan mendapatkan keuntungan material dan finansial. Terorisme psikis merupakan teror yang berkaitan dengan kepercayaan, mitos, dan magis. Terorisme perang merupakan bentuk teror melalui pemusnahan musuh melalui kekerasan fisik. teror politik merupakan upaya kekerasan dan teror yang sistematis guna mencapai kekuasaan politik.

Selain tipologi tersebut di atas terdapat pula tipologi terorisme yang dinyatakan oleh Miller, yaitu: terorisme separatis nasional, terorisme revolusioner, terorisme reaksioner dan terorisme religious (Winarno, 2014:176)

Terorisme separatis nasional adalah terorisme yang terjadi dalam lingkup pemerintahan suatu Negara dimana ada kelompok-kelompok tertentu yang kecewa terhadap pemerintahan kemudian berujung kepada upaya melepaskan diri dari kedaulatan Negara tersebut. Terorisme revolusioner adalah terorisme dalam kategori menggunakan kekerasan dan terror guna mengubah tatanan politik suatu Negara. Terorisme Reaksioner, adalah terorisme yang bersifat reaktif terhadap isu-isu atau masalah tertentu yang sedang mengemuka. Kelompok semacam ini lebih sulit dilacak karena lebih kecil dan berpindah-pindah. Terorisme Religius, gerakan terror yang mengatasnamakan keyakinan agama tertentu sebagai dasar tindakannya.

Terorisme merupakan fenomena yang kompleks, karena memiliki banyak motif atas tindakan tersebut. Ada beberapa penjelasan dominan tentang motif terorisme yang semakin meluas di seluruh dunia.

Pertama, yaitu motif budaya. Globalisasi telah membawa muatan budaya materialistic yang tidak sesuai dengan kelompok tertentu dalam masyarakat. hal ini tentu mendorong kelompok-kelompok masyarakat tersebut meraih kembali identitas local mereka. “Jika globalisasi memunculkan lokalisasi, maka dalam ranah budaya, globalisasi juga memunculkan kesadaran akan budaya local, dan dalam situasi seperti ini pemberontakan atas budaya dominan tampaknya tak bisa dihindarkan (Winarno, 2014:179).

Kedua, motif keadilan ekonomi. Globalisasi sebagaimana difahami berhubungan erat dengan terciptanya kemiskinan di Negara-negara dunia ketiga. Hal ini berakibat kelompok-kelompok miskin menjadi lebih rentan terhadap tindak kekerasan dan keamanan (Winarno, 2014:179).

Penjelasan lain motif terorisme terjadi karena berasal dari ranah psikologi sosial. Menurut penjelasan ini teroris adalah orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, meski tidak semua tindakan terorisme merefleksikan hal tersebut.

Motif-motif di atas merefleksikan pengertian atau motif terorisme dari sudut pandang pemegang status *quo*. “*Some terrorist are still patriots and genuine revolutionaries, this pattern is no longer typical.*” (Laqueur, dalam Kegley & Wittkopf, 2001:83). dengan kata lain jika dipandang dari sudut yang berbeda, meski tidak lagi khas beberapa kelompok teroris dapat dikatakan patriot dan revolusioner sejati.”

Demikianlah mobilitas terorisme lintas batas Negara hanya mungkin dicegah dengan kerjasama ditingkat regional dan global. upaya-upaya pencegahan harus menuju pada akar permasalahan yang sebenarnya. Apakah bersifat ketimpangan ekonomi, marginalisasi politik, atau bisa jadi penindasan.

B.1.4 Proliferasi Senjata Nuklir

Proliferasi nuklir adalah peningkatan jumlah senjata nuklir oleh Negara yang terlebih dahulu memiliki senjata nuklir yang termasuk Nuclear Weapon States, seperti AS, Inggris, Prancis, Rusia dan China. Dan peningkatan senjata nuklir oleh Negara-negara lain yang sebelumnya terhalang dengan perjanjian *Non Proliferation Treaty*. Di mana berdasarkan perjanjian tahun 1967 tersebut hanya 5 negara tersebut saja yang boleh memiliki nuklir. Namun kemudian terjadi proliferasi nuklir dengan masuknya India, Pakistan dan Israel. Keadaan ini semakin rumit ketika Negara-negara lain juga melakukan kepemilikan dan uji coba persenjataan nuklir seperti Iran, Korea Utara dan Suriah.

Nuklir sebagaimana diketahui merupakan kekuatan pemusnah massal yang berbahaya bagi peradaban manusia. Perkembangannya berjalan seiring dengan meningkatnya ketegangan antar kawasan yang diikuti oleh perlombaan senjata.

Proliferasi ini menjadi isu yang sangat kompleks karena berkaitan dengan stabilitas kawasan. “Bagi para realis, proliferasi nuklir meningkatkan instabilitas dan potensi konflik antar Negara, namun disisi lain ada pendapat bahwa proliferasi senjata nuklir bukanlah sesuatu yang buruk justru karena dapat meningkatkan stabilitas kawasan” (Winarno, 2014: 272).

Persoalan proliferasi nuklir ini juga berangkat dari 5 negara NWS sendiri terutama AS. “Hal ini bisa dilihat dari respon mereka yang tidak pernah fair dalam persoalan nuklir. AS misalnya tidak pernah mempersoalkan program nuklir Jepang maupun Pakistan, tapi terhadap Iran dan Korea Utara AS begitu turut campur.”(Winarno, 2014: 266)

Dapat terlihat persoalan proliferasi nuklir ini berkembang dari sekedar meningkatkan stabilitas kawasan menjadi penggalangan kepemilikan nuklir bagi kepentingan keamanan pihak-pihak tertentu. Betts mengatakan, “*Counter-proliferation has become a cottage industry in the pentagon and the intelligence community, and many worthwhile initiatives to cope with threats are under way.*”(Betts, 2001:70). Dengan kata lain kontra - proliferasi telah menjadi industri rumahan di pentagon dan komunitas intelijen, dan banyak inisiatif berharga untuk mengatasi ancaman sedang berlangsung bagi kepentingan sendiri. Kondisi ini menggambarkan terjadinya ketidakadilan dalam pensikapan atas kepemilikan nuklir. Presiden Ahmadinejad menyikapi hal ini berkata, “Jika Amerika dan Israel diperbolehkan memiliki nuklir untuk tujuan perang, mengapa Iran tidak diperbolehkannya walau hanya untuk tujuan damai?” (Eramuslim Digest).

B.2 Dampak Globalisasi pada Ekonomi Dunia

B.2.1 Kemiskinan dan Kesenjangan Global

Kuatnya ideologi pasar bebas di tengah usaha transformatif pengentasan kemiskinan berimbas pada hasil-hasil yang kontraproduktif. Sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Jendral UNCTAD, Supachai Panitchipak, jumlah negara yang tergolong dalam kategori “sangat miskin” meningkat dua kali lipat dalam 30 hingga 40 tahun terakhir. Sementara jumlah penduduk yang hidup dalam tingkat kemiskinan ekstrem juga ikut meningkat dua kali lipat ([Http: //international.okezone.com/read/2010/11/26/18/397427/dunia-semakin-miskin.](http://international.okezone.com/read/2010/11/26/18/397427/dunia-semakin-miskin.))

David Cox mendefinisikan beberapa dimensi kemiskinan yang dikategorikan berdasar akar penyebab munculnya kemiskinan. (Cox, dalam Suharto, 2009:15) *Pertama*, kemiskinan yang disebabkan oleh globalisasi. *Kedua*, kemiskinan akibat pembangunan. Disini kita bisa menemukan kemiskinan subsisten sebagai suatu kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya pembangunan, kemiskinan akibat marginalisasi pedesaan dalam pembangunan dan kemiskinan perkotaan yang disebabkan percepatan pertumbuhan yang tidak dapat diimbangi atau tidak menyentuh masyarakat miskin kota. *Ketiga*, kemiskinan sosial, yakni kemiskinan yang dialami oleh kelompok-kelompok minoritas. *Keempat*, Kemiskinan konsekuensial, yakni kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal seperti konflik, bencana alam, dan sebagainya.

Diantara penyebab kemiskinan akibat globalisasi dunia adalah Structural Adjustment Program (SAPs) yang didesakkan IMF pada Bank Dunia. (Budi Winarno, 2014:52) SAPs ini bersandar pada ideologi neoliberal sehingga hegemoni neoliberalisme pada dasarnya menjadi

factor utama mengapa kesenjangan global meningkat tajam dan angka kemiskinan sangat besar.

Ada dua sebab faham neoliberalis ini dianggap sebagai penyebab kemiskinan, *pertama*, basis ideologi neoliberal adalah kompetisi. Sementara kompetisi hanya akan berlangsung secara adil jika masing-masing partisipan mempunyai kapasitas atau kekuatan yang kurang lebih sama. Dalam pasar neoliberal, semua harus bersaing dalam medan yang sama, tidak peduli apakah industri baru tumbuh ataukah mereka sudah kuat. Hal ini berakibat keuntungan hanya akan didapatkan oleh pemain yang kuat.

Sebab *kedua*, adalah pembelaan atas pasar telah membuat peran negara dalam pembangunan menjadi termarginalkan. Hal ini terjadi karena faham neoliberal pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai, “agenda pengaturan masyarakat yang didasarkan pada dominasi *homo economicus* dalam diri manusia, sehingga pada prakteknya terjadi dominasi sektor finansial atas sektor riil dan tata ekonomi politik.” (Priono, *Marginalisasi ala Neoliberal*, Basis, nomor 05-06, tahun ke 53, Mei-Juni 2005).

konsekuensi dari faham ini membuat Negara tidak diijinkan campur tangan dalam perekonomian karena pasarlah satu-satunya mekanisme paling baik dalam mendorong produksi, distribusi dan konsumsi. Singkatnya pasarlah mekanisme paling efektif yang bisa diandalkan untuk mendistribusikan sumber-sumber ekonomi.

Akibat yang ditimbulkan dari agenda *neoliberalism* secara jelas membangkrutkan banyak usaha kecil dan menengah di Negara-negara berkembang yang berujung pada pengangguran. Sementara hilangnya perusahaan-perusahaan kecil kemudian diikuti semakin membesarnya perusahaan-perusahaan asing yang menjadi kompetitor. Kondisi semacam ini diperburuk dengan bagaimana Negara-negara berkembang secara sistematis memangkas kesejahteraan buruh demi mengundang investasi. Buruh murah selalu digunakan sebagai keunggulan kompetitif dalam menarik investasi asing.

Sebagai sebuah lembaga yang seharusnya menciptakan regulasi yang bisa mengontrol perilaku menyimpang yang diatur dalam struktur politik, ekonomi dan sosialnya, Negara berkembang justru tergerus dalam agenda neoliberalism.

Menurut Francis Fukuyama, negara dengan fungsi kelembagaannya dapat menjadi salah satu alternative pemberantasan kemiskinan. Tantangannya adalah menciptakan Negara dengan birokrasi yang efektif. (Fukuyama, 2005:56) Kenyataannya, di Negara-negara berkembang sistem birokraasinya seringkali korup dan tidak efektif. Selain itu birokrasi yang korup akan menciptakan birokrasi yang membuka peluang bagi penguasaan asing secara lebih luas. Cardoso mengemukakan, “ketergantungan ekonomi dan dominasi asing akan sangat dipengaruhi oleh perilaku elit dan borjuasi lokal.” (Cardoso dalam Suwarsono dan Alvin Y, 1994:78)

Dengan demikian sebenarnya mengentaskan kemiskinan jauh lebih kuat keberhasilannya disamping kelembagaan juga membongkar ideologi dominan yang ada.

B.2.2 Krisis Pangan Dunia

Salah satu ancaman globalisasi terhadap ekonomi adalah masalah kelangkaan pangan. Jumlah penduduk yang terus meningkat telah menciptakan kebutuhan pangan yang semakin meningkat pula. Bahkan kelangkaan pangan di beberapa Negara afrika menciptakan kerusuhan-kerusuhan horizontal. Krisis pangan membutuhkan penanganan serius oleh semua aktor dalam dunia internasional.

Ancaman krisis pangan termasuk dipengaruhi oleh intervensi lembaga keuangan multilateral saat krisis di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Atas saran Dana Moneter Internasional (IMF), anggaran dan subsidi pertanian dipangkas, budidaya pertanian diarahkan pada komoditas perkebunan penghasil devisa untuk membayar hutang, sementara itu alokasi untuk investasi di sector industri seperti teknologi Informasi dan manufaktur mengalami peningkatan. Kondisi ini semakin diperparah dengan swastanisasi air yang diprakarsai bank dunia (Samhadi, *Menunggu Revolusi Kedua*, Kompas, Edisi 6 Desember 2006: 37).

Hal lain adalah skema liberalisasi pasar yang tidak adil yang dilakukan *Food Drug Administration* dengan mempersulit masuknya produk pangan dan pertanian Negara berkembang jika kualifikasi produk yang dianggal tak memenuhi standar labeling AS. FDA menolak dan menahan ekspor kakao indonesia dan menahan produk sekitar 45 hari. prosedur ini membengkakkan biaya ekspor dan menurunkan daya saing produk Negara berkembang.

Dalam konteks liberalism pasar yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan, pemerintah diharapkan bijaksana dalam mekanisme impor dan ekspor produk pangan. Impor dapat dilakukan dengan orientasi pemenuhan kebutuhan domestic dan dilaksanakan pada skema birokrasi yang sehat. Adapun ekspor diharapkan berorientasi pada keuntungan dan kesejahteraan petani, bukan hanya pelaksanaan skema pasar bebas yang hanya menguntungkan spekulan atau elite tertentu.

B.2.3 Money Laundering

Menurut Reuter dan Truman, "*money laundering* adalah pengonversian hasil pendapatan atau pemasukan dari tindakan criminal menjadi asset yang tidak bisa dilacak kembali pada tindak kejahatan awal.(Reuter dan Truman, 2004:1) Pendapatan ini bisa berasal dari tindak kejahatan seperti perdagangan ilegal, penyelundupan, perdagangan narkoba, trafficking, korupsi, dan lain-lain.

Praktik *money laundering* bisa menimbulkan beberapa dampak negatif yang sangat merugikan kepada sektor ekonomi sebagai berikut, ([http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Money Laundering.pdf](http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Money_Laundering.pdf)) *pertama*, Dampak Ekonomi Mikro, (1) cara perolehan uang yang ilegal mengganggu jalannya ekonomi pasar. praktek ini mengakibatkan keuntungan pada satu pihak membawa kerugian pada pihak lain (2) penurunan produktifitas masyarakat.

Kedua, Dampak ekonomi makro, (1) mengurangi pajak / penerimaan Negara. (2) jika dana tersebut dibawa keluar negeri mengakibatkan berkurangnya dana perbankan yang menyebabkan kesulitan bank melakukan ekspansi kredit. (3) menambah keguncangan stabilitas ekonomi makro.

Ketiga, Dampak sosial politik, praktek ini memungkinkan munculnya dampak negatif bagi sektor sosial politik. Para pelaku *money laundering* mungkin saja mempengaruhi kebijakan pemerintah atau pejabat Negara melalui praktek suap.

Melihat dampak yang merugikan dari *money laundering* secara global, terutama efeknya yang bisa merusak ketahanan ekonomi Negara, maka tentunya diperlukan upaya-upaya yang efektif untuk memberantas perkembangannya. “suatu hukum internasional yang baku harus dibuat agar menjadi patokan bagi Negara-negara di dunia.” (Wallace, 1986:23). Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah Negara-negara di dunia untuk memberantas praktik *money laundering*, sehingga mempermudah kerjasama bilateral maupun multilateral dalam kerangka institusi supranasional untuk memerangi *money laundering* secara global.

B.3 Dampak Globalisasi pada Cara Berfikir

B.3.1 Solidaritas Dunia Maya

Dibanyak negara reformasi terjadi karena keterbukaan informasi yang mereka dapatkan dari internet. Melalui teknologi informasi juga masyarakat di belahan dunia manapun bisa saling berhubungan, bertukar informasi dan juga membangun apa yang disebut sebagai “solidaritas dunia maya”. *The Network Society* sebagaimana pernah dikemukakan oleh Manuel Castells (2000:86) membuka peluang bagi terciptanya jaringan aktivis global di semua bidang termasuk diantaranya bidang hak asasi manusia.

Sekarang ini menjadi sangat jamak di mana para aktivis di seluruh dunia mampu berkoordinasi satu sama lain untuk memperjuangkan suatu isu dan gagasan-gagasan tertentu. Ini dimungkinkan karena kemajuan dibidang telekomunikasi dan transportasi. Dalam kondisi semacam ini, teknologi informasi mampu mempromosikan demokratisasi politik dan sosial dalam skala luas. Dengan kata lain globalisasi turut mempromosikan terbentuknya jaringan para aktivis sosial dibidang HAM, kebebasan sipil, gender, perlindungan terhadap anak, lingkungan, dll.

Sebagai contoh efektivitas kelompok solidaritas dunia maya ini dalam bidang penegakan HAM, globalisasi memungkinkan tindakan-tindakan bersama dimana suatu negara tidak bisa lagi bersembunyi dibalik yuridiksinya. Demikian pula sebuah Negara nasional bisa dikucilkan kapan saja ketika mereka melakukan pelanggaran berat. Hal ini bisa dilakukan melalui embargo ekonomi ataupun politik. Keterbukaan ini tercipta karena era globalisasi membuka peluang bagi munculnya cara berfikir untuk menyelesaikan masalah-masalah secara global pula, melakukan peran-peran global meski bukan melalui sebuah lembaga Negara.

Selain kelompok solidaritas yang menyerukan isu-isu yang positif, globalisasi juga memberikan jalan terbentuknya kelompok solidaritas dunia maya yang bersifat negatif, seperti jaringan terorisme yang menghimpun orang-orang karena kesamaan cara berfikir dan kepentingan. Budi Winarno mengemukakan, “kelompok-kelompok Islam radikal dapat dikategorikan kelompok ini.” (Winarno, 2014:178)

Secara umum solidaritas dunia maya ini terbentuk karena adanya tuntutan masyarakat yang ingin mendapatkan perlakuan yang lebih demokratis, adil, manusiawi, egaliter dan humanis.

B.3.2 Gerakan Perempuan Transnasional

Kekerasan yang secara khusus berkaitan dengan gender terhadap kaum perempuan telah menjadi politik transnasional kaum perempuan. Dalam era globalisasi boleh dikatakan bahwa secara global peran perempuan masih tetap didiskriminasikan dan dimarginalkan. “Mereka memegang hanya 1 persen dari kekayaan dan sumber daya dunia, kurang dari 10 persen yang menjadi kepala negara dan menteri kabinet, mayoritas pengungsi, buta huruf dan miskin.” (Winarno, 2014:372) Sementara itu perempuan juga menjadi pusat ketahanan sosial dan materi keluarga serta masyarakat. Perempuan juga menjadi garda depan gerakan lingkungan, perdamaian, pribumi, nasionalis, serta gerakan sosial dan kritis lainnya.

Pada dasarnya gerakan perempuan transnasional ini terlahir dari kondisi kemiskinan, keterbelakangan ilmu pengetahuan dan kurangnya akses perempuan dunia ketiga, yang secara ironis mendorong terjadinya migrasi luar biasa para perempuan tersebut. Mereka tidak hanya menjadi buruh murah, melainkan juga dijadikan budak seks dan korban kekerasan seksual di negara-negara maju. (Winarno, 2014:376)

Oleh karenanya peran perempuan dalam era globalisasi saat ini sangat banyak. Mereka mencoba meraih kesetaraan dalam berbagai bidang meski hal itu membutuhkan perjuangan yang keras bagi perempuan.

B.4 Dampak Globalisasi pada Ideologi

Ideologi memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, yang tampak dalam karya beberapa ilmuwan dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Secara deskriptif ideologi diistilahkan sebagai, “cara berfikir, sistem kepercayaan, praktik-praktik simbolik yang berhubungan dengan tindakan sosial dan politik.” (John B. Thompson, 2014:14) penggunaan istilah ini merupakan konsepsi yang netral tentang ideologi, tidak ada upaya pada basis konsepsi ini untuk memisahkan antara jenis-jenis tindakan dengan ideologi tersebut.

Sedangkan istilah ideologi secara kritis menunjukkan bahwa, “ideologi secara mendasar berhubungan dengan proses pembenaran hubungan kekuasaan yang tidak simetris dan berhubungan dengan pembenaran sebuah dominasi.” (Thompson, 2014:15) Penggunaan istilah ini mengandung konotasi negatif ideologi sebagai sebuah alat kekuasaan untuk mendukung hegemoni kekuasaan tersebut. Dengan adanya era globalisasi, ideologi secara

praktis semakin kabur, karena aktor-aktor internasional saling mempengaruhi dan menanamkan hegemoninya.

B.5 Berdakwah di Era Global

Perubahan masyarakat maupun situasi global yang fenomenal, seharusnya diimbangi dengan adanya perubahan cara berdakwah yang dilakukan oleh para *da'i*. Dakwah tidak boleh jalan di tempat dan menggunakan cara-cara yang konvensional saja (ceramah). Dakwah harus dinamis, progresif, dan penuh inovasi. Para *da'i* perlu menciptakan kreasi-kreasi baru yang lebih membumi dan dapat membawa kemaslahatan umat. Jangan sampai dakwah menjadi beban masyarakat dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Dakwah perlu dikemas lebih manusiawi, dialogis, memenuhi kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Berikut ini beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan keberhasilan dakwah di era global.

B.5.1 Merubah Paradigma Dakwah

Dalam era global paradigma dakwah harus dikembangkan, ia bukan sekedar aktivitas ceramah semata yang mengandalkan “panggilan” objek dakwah. Dakwah harus dikembangkan lebih luas lagi selain *tabligh*, ia juga harus dimanajemen hingga menghasilkan perubahan masyarakat. Dakwah juga dapat berbentuk rekayasa sosial untuk membangun komunitas masyarakat.

Sangat disayangkan setiap bila *da'i* dalam melakukan kegiatan dakwahnya hanya menyesuaikan hobi dan kesenangan masyarakat pendengarnya, sehingga meskipun mereka sering mengikuti ceramah, perubahan dalam masyarakat sasaran hampir tidak ada. Oleh karena itu sudah waktunya dakwah dilakukan dalam sebuah organisasi yang teratur dan rapih. yang menghimpun berbagai keahlian, profesi dan kekuatan. Di situ ada ahli perencanaan, ahli pendidikan, ahli komunikasi, ahli psikologi, ahli pertanian, ahli kesehatan dan bidang lainnya yang diperlukan. Dalam organisasi dan lembaga tersebut direncanakan dengan matang materi dan metode dakwah, sasaran serta evaluasinya.

Dakwah sebagai sebuah kegiatan pengembangan masyarakat harus berorientasi kepada beberapa hal berikut, (a) dakwah harus berorientasi kesejahteraan lahir dan batin masyarakat luas, ia tidak sekedar memenuhi selera kesenangan objek dakwah. (b) dakwah berorientasi pada pemecahan masalah objek dakwah secara sosial. (c) program dakwah harus didasarkan atas kebutuhan asasi masyarakat baik materi maupun non materi. (d) kerja-kerja dakwah melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif baik mulai perencanaan hingga evaluasinya. (e) dakwah bersifat lintas sektoral dan budaya (f) kerja dakwah harus berkesinambungan, *da'i* harus berada bersama-sama “kaumnya” (g) kerja-kerja dakwah harus disusun terlebih dahulu berdasarkan potensi dari sumber daya yang ada (Aziz, 2005:15-18).

Dengan demikian diharapkan dari perkembangan paradigma dakwah ini kehidupan masyarakat berubah kearah yang lebih partisipatif, terbuka dan emansipatoris terjadi.

B.5.2 Mempersiapkan Da'i dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Untuk mendukung adanya perubahan dalam berdakwah, para *da'i* perlu terus menerus meningkatkan wawasan, ilmu dan kemam-puan teknis yang diperlukan dalam melakukan dakwah. Da'i tidak merasa puas dengan ilmu yang dimilikinya, melainkan terus belajar, belajar sepanjang hayat (*long life education*). Apalagi pada era informasi seperti sekarang ini, kemampuan da'i dalam mengoperasikan komputer dan internet merupakan prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar. Dengan komputer da'i bisa menulis dan menyimpan gagasan-gagasan yang akan disampaikan kepada masyarakat, bisa dimanfaatkan untuk mengoperasikan LCD, membaca kitab-kitab dan al-Qur'an dengan bantuan cd-room, mengakses internet dan lain-lain.

Mengapa *da'i* perlu memiliki kemampuan di bidang komputer dan internet? Karena masyarakat sebagai obyek dakwah, semakin banyak yang memanfaatkan komputer dan internet. Sekarang ini komputer dan internet sudah diperkenalkan pada anak-anak di tingkat Sekolah Dasar, bahkan sejak Taman Kanak-Kanak. Pemerintah pun sudah berupaya membantu jaringan internet agar bisa masuk ke desa-desa. Fasilitas *hand phone* sudah dipenuhi dengan sistem yang bisa mengakses internet. Rumah makan, hotel, kampus, sekolah, perkantoran dan lain sebagainya telah menyediakan *hotspot area* (daerah bebas berinternet). Jika masyarakat telah begitu terbuka untuk bisa memanfaatkan komputer dan internet, sementara *da'i* tidak mau tahu komputer dan internet, bisa terjadi "kiamat" bagi *da'i* tersebut dan kegiatan dakwahnya kurang mengikuti perkembangan masyarakat.

Kemudian pada era modern ini, ilmu yang berkembang bersifat multidisipliner dan komplementer. Ilmu agama yang selama ini menjadi pegangan *da'i* (sumber utama) perlu diperkuat dengan keilmuan lainnya agar apa yang disampaikan ke masyarakat menjadi kokoh dan dapat dioperasionalkan di lapangan. Ilmu agama Islam dapat diperkuat dengan menggunakan kajian ilmu psikologi, sosiologi, sejarah dan sebagainya. Oleh karena itu, *da'i* perlu memperkuat ilmu agama yang dimilikinya dengan menambah wawasan dan pengetahuan yang berdasar dari ilmu-ilmu sosial, humaniora maupun ilmu-ilmu alam. Kesemua hal yang terkait dengan pengembangan diri tersebut dimungkinkan jika *da'i* memiliki bekal pemahaman teknologi yang baik.

B.5.3 Memanfaatkan Teknologi Informasi

Dalam era modern ini, perkembangan di bidang teknologi informasi sedemikian pesatnya sehingga kalau digambarkan secara grafis, kemajuan yang terjadi terlihat secara eksponensial dan tidak ada yang dapat menahan lajunya perkembangan teknologi informasi. Amat disayangkan manakala kemajuan teknologi informasi ini tidak dimanfaatkan untuk

kepentingan dakwah. Apalagi dalam realitas sekarang ini, hampir sebagian besar masyarakat telah memiliki peralatan teknologi informasi, baik komputer, internet, *hand phone*, dan sebagainya. Ibaratnya, dunia masyarakat sekarang ini adalah dunia teknologi informasi.

Salah satu contoh peralatan teknologi yang banyak disukai oleh masyarakat adalah televisi. Kehadiran televisi bagi masyarakat industri bagaikan “agama baru”. Betapa tidak, televisi telah menggeser agama-agama konvensional. Khotbahnya didengar dan disaksikan oleh jamaah yang lebih besar dari jamaah agama apapun. Rumah ibadahnya tersebar di seluruh pelosok bumi, ritus-ritusnya diikuti dengan penuh kekhidmatan dan dapat menggetarkan hati serta mempengaruhi bawah sadar manusia. Kehadiran televisi juga telah mengambil sebagian besar waktu manusia untuk menonton televisi. Menurut *Broadcasting Year-book* (Jeffres, Leo W, *Mass Media Process and Effects*, 1986: 122). Rumah-rumah di Amerika Serikat, 25 % menonton TV di waktu pagi, 30 % di waktu sore, dan 63 % di waktu malam (jam 8-11), dan hampir $\frac{3}{4}$ atau 84 % dari mereka adalah menonton televisi.

Selain kehadiran televisi yang luar biasa dahsyatnya, televisi juga memberikan pengaruh sosial, politik, ekonomi dan budaya. Secara sosial, televisi mempengaruhi efek psikologis dari para penonton, terutama pengaruh kekerasan dan hubungan antar jenis. Secara politik, televisi mempengaruhi struktur politik, opini publik, dan kultur politik. Secara ekonomi, televisi dapat mempengaruhi pola konsumsi individu/masyarakat dan harga-harga di pasar. Terakhir, secara budaya televisi berpengaruh terhadap perkembangan budaya di berbagai Negara.

Bertitik tolak dari uraian di atas, peluang besar menantang kita sebagai umat Islam untuk mengisi kekosongan-kekosongan atau kelemahan-kelemahan yang ada. Film-film fiksi anak-anak yang membawa nuansa sejuk, penuh pendidikan dan memiliki nilai-nilai keagamaan menjadi lahan empuk untuk dikembangkan. Begitu juga, film-film/sinetron-sinetron keluarga yang bertitik tolak dari realitas dan mampu membangkitkan semangat untuk berusaha keras serta jauh dari aksi-aksi kekerasan.

Melalui teknologi informasi seni memancarkan nilai-nilai Islam sehingga orang terpenggil untuk mengikuti. Demikian juga, dakwah yang sejuk dan tidak memaksa merupakan cerminan rasa estetika (seni) yang ada pada diri *da'i* yang bisa disalurkan melalui media atau secara langsung.

C. Penutup

Era globalisasi telah menyatukan dimensi-dimensi kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, keamanan, budaya maupun lingkungan hidup melalui proses-proses integrasi, kesaling-hubungan dan ketergantungan. Oleh karenanya persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak hanya semakin kompleks melainkan melintasi batas-batas nasional (transnasional) dan konsekuensinya sangat mempengaruhi dan menimbulkan dampak yang tidak dapat dihindari bagi seluruh warga dunia.

Kecenderungan dalam politik dunia adalah melemahkan Negara-bangsa. Kecenderungan itu terjadi baik karena alasan normative maupun ekonomi. Banyak negara yang terlalu kuat menindas Negara-negara tetangga bahkan warganya sendiri. Pada saat bersamaan pertumbuhan ekonomi global cenderung mengikis otonomi Negara bangsa dan menimbulkan ketimpangan.

Tercapainya kesejahteraan bersama tak ayal lagi memerlukan sebuah tatanan dunia baru yang menjamin terciptanya kerjasama harmonis dan setara antar seluruh aktor dalam proses globalisasi. Lebih daripada itu Negara-negara tidak punya pilihan kecuali, “kembali kepada Negara bangsa yang berdaulat dan mencoba memahami sekali lagi bagaimana menjadikannya kuat dan efektif.” (Fukuyama, 2005:157) atau jika meminjam perkataan al Qaradhawi (1421: 240),

الدولة القومية لن تستعيد قوتها، ما لم تستعد الأمة ذاتها قوتها. فإنها قوة الدولة بقوة شعوبها، فالشعوب الميته لا تقيم دولة حية، و الشعوب الضعيفة لا تبني دولة قوية، كما في الأثر المشهور “كما تكونوا يولّ عليكم”

Negara tidak dapat mengembalikan kekuatannya selama rakyatnya sendiri tidak mengembalikannya. Kekuatan Negara terletak pada kekuatan rakyat. Rakyat yang mati tidak bisa menghidupkan Negara. Rakyat yang lemah tidak bisa menguatkan Negara, sebagaimana sebuah pepatah, “sebagaimana adanya kalian begitulah kuasa kalian”.

Daftar Pustaka

- Aziz, Moh. Ali, *Dakwah pemberdayaan masyarakat: paradigma aksi metodologi*, (Jakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2005).
- Castells, Manuel, *The Network Society*, (Cambridge: Polity Press, 2000).
- Cardoso dalam Suwarsono dan Alvin Y, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1994).
- Cox, David, dalam Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Dault, Adhyaksa, *Islam dan Nasionalisme*, (Jakarta: Yadaul, 2003).
- Eramuslim Digest, *Israeli Nuke*, (Jakarta: Eramuslim Global Media).
- Fukuyama, Francis, *Memperkuat Negara; Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, (alih bahasa oleh A Zaim Rafiqo, Jakarta: Gramedia, 2005).
- Ghasemi , Hakem, *Globalization and International Relations: Actors Move from Non-cooperative to Cooperative Games*, (Iran : IKIU, 2012).
- Giddens, Anthony, *The Consequences of Modernity*, (San Fransisco:Stanford University Press, 1990).
- Hendropriyono, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Kompas, 2009)
- Higgott, Richard, *The International Political Economy of Regionalism*, (New York: Routledge, 1998).
- Hirst, Paul & Graham Thompson, *Globalization in Question*, (Malden USA : Blackwell Publishers, 2000).
- Hornby, A S, *Oxford Advancer Learner Dictionary*,(Great Britain: Oxford University Press, 1974).
- al Jabiry Muhammad Abid, *Qadhaya fil Fikr al Muashir*, (Beirut: Markaz Dirasat al Wahdah al Arabiyah, 2001).

- Kegley, Charles W. & Eugene R. Wittkopf, *The Global Agenda; Issues and Perspectives*, (New York : McGraw-Hill Companies, 2001).
- Leo, Jeffres, *Mass Media Process and Effects*, (Illinois : Waveland Press, 1986).
- Oougard' Morten, *Political Globalization: State, Power and Social Forces*,(New York: Palgrave Macmillan, 2004).
- Priono, B. Herry, *Marginalisasi ala Neoliberal*, Basis, nomor 05-06, tahun ke 53, Mei-Juni 2005.
- al Qaradhawi, Yusuf, *Ummatuna Baina Qarnain*, (Beirut: Daar asy Syuruq, 1421 H).
- Reuter, Peter dan Edwin M. Truman, *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*, (Washington: The Institute for International Economics, 2004).
- Rossenau, J, *Governance, Order and Change in World Politics*, (New York: Cambridge University, 1992).
- Samhadi, Sri Hartati, *Menunggu Revolusi Kedua*, Kompas, Edisi 6 Desember 2006.
- Scholte' Jaan Art, *Globalization; A Critical Introduction*, (New York: Palgrave Macmillan, 2000).
- Stiglitz, Joseph E., *Kegagalan Globalisasi dan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*, (alih bahasa oleh Ahmad Lukman, Jakarta: Ina Publikatama, 2012).
- Thompson, John B., *Analisis Ideologi Dunia; Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014).
- Wallace, Rebecca M, *International Law*, (London: Sweet & Maxwell Limited, 1986).
- Winarno, Budi, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, (Jakarta: Center of Academic Publisihing Service, 2014).